



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



ACEH UPDATE  
Juli, 2005

## **PARTISIPASI WARGA DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMULIHAN**

Pada tanggal 5-6 Juli, USAID Local Governance Support Program (LGSP) membantu Kota Banda Aceh menyelenggarakan serangkaian konsultasi publik bagi masyarakat korban tsunami untuk membahas pelaksanaan Rencana Tindak Pemulihan Kota dan mengkoordinasikan perencanaan di tingkat masyarakat guna menentukan lokasi bagi pembangunan perumahan, mesjid, jalan, sekolah, puskesmas, pasar dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan ini dipimpin oleh Walikota dan melibatkan ratusan warga, perwakilan resmi dari Gampong, Imam Mukim (pimpinan mesjid setempat), pemuka masyarakat, LSM lokal, staf pemerintah daerah, anggota DPRD, dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR). Acara ini dipusatkan di mesjid-mesjid di kawasan tersebut. Salah seorang anggota DPRD Banda Aceh, Surya Mutiara, menekankan bahwa, "Model komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semacam ini perlu dilanjutkan dan dilembagakan di Banda Aceh."

Isu utama yang dikemukakan oleh masyarakat diantaranya adalah permintaan untuk meneruskan pelibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta memperbesar peran kecamatan dalam proses tersebut. Beberapa masalah lain yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah: hak kepemilikan tanah; kepastian mengenai pembangunan pemukiman; pembangunan tembok penghalang untuk menghalau gelombang pasang; pembangunan kembali sekolah-sekolah; pembangunan kembali sarana kesehatan seperti Puskesmas; membersihkan bangkai-bangkai kapal yang hancur; rehabilitasi tambak ikan dan udang; dan pemberdayaan lembaga mukim (dewan hukum adat setempat).

Walikota meminta agar setiap desa menuntaskan rencana mereka dan mengajukannya ke kantor Bappeda untuk kemudian dipadukan ke dalam rencana aksi yang akan diteruskan ke BRR pada akhir bulan Juli. Dokumen ini akan berfungsi sebagai panduan bagi seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang mendukung proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Banda Aceh. Walikota juga meminta dukungan lembaga donor dan LSM internasional dalam pelaksanaan rencana tindak tersebut.

## **REORGANISASI DEMI PERBAIKAN PELAYANAN**

Di tengah kondisi layanan umum yang tidak berfungsi dan hancurnya berbagai sarana publik, Kota Banda Aceh saat ini berjuang keras untuk dapat menyelenggarakan dengan segera berbagai pelayanan pokok bagi warganya. Dengan dukungan dari USAID - Local Governance Support Program (LGSP), Pemerintah Kota Banda Aceh mencoba untuk merampingkan struktur organisasi dan prosedur pemerintahan dalam usaha menggerakkan kembali dan memperbaiki pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi lokal.

Pada awal bulan Juli 2005, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memfasilitasi penyelenggaraan lokakarya peningkatan layanan publik, bersama dengan para wakil masyarakat, aparat pemerintah daerah, dan para pengusaha lokal. Lokakarya ini dipimpin langsung oleh Walikota dan Sekretaris Provinsi. Para peserta lokakarya mengkaji ulang fungsi-fungsi pokok dan standar pelayanan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, serta menyusun daftar prioritas pelayanan publik yang perlu diperbaiki. Pemerintah kota akan membentuk gugus tugas pembinaan organisasi untuk meninjau kembali wewenang dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah yang ada guna menghindari tumpang tindih, menggabungkan fungsi-fungsi dan dinas-dinas yang berkaitan

demi peningkatan efisiensi, serta membentuk Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang menangani masalah gender. Diusulkan pula untuk membentuk kantor layanan satu atap, merampingkan prosedur perijinan dan sistem informasi, serta meninjau kembali peraturan perundangan mengenai layanan publik agar lebih fokus dan penerapan pengukuran kinerja.

## **PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BAGI BANDA ACEH**

Pada tanggal 7-8 Juli 2005, Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan LGSP-USAID menyelenggarakan lokakarya peningkatan kapasitas tentang Penganggaran Berbasis Kinerja. Acara ini ditujukan bagi para staf senior dan para pengambil keputusan Pemerintah Kota Banda Aceh. Aparat pemerintah telah mengidentifikasi bahwa penganggaran berbasis kinerja merupakan bidang utama yang perlu mendapat bantuan teknis dari LGSP. Hal ini dibutuhkan dalam rangka membangun kembali sistem pemerintahan kota dan dalam rangka perbaikan pengelolaan layanan. Dengan sistem penganggaran berbasis kinerja, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk mendanai tugas dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sistem ini pula dapat diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut mampu menghasilkan sejumlah keluaran (*output*), berikut hasil (*outcome*) yang kemudian akan dicapai.

Lokakarya yang berlangsung di *Hotel Jeumpa* ini dibuka secara resmi oleh Walikota Banda Aceh, Ir. Mawardy Nurdin. Kegiatan ini melibatkan sekitar 50 peserta dari berbagai instansi pemerintahan Kota Banda Aceh, DPRD, dan perusahaan-perusahaan daerah. Dalam kegiatan ini, peserta diperkenalkan dengan prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja. Mereka belajar mengenai peran dan tanggung jawab yang diharapkan dalam proses penganggaran, dan mengidentifikasi langkah-langkah dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja serta bantuan teknis pengelolaan keuangan di Banda Aceh. Lokakarya ini merupakan awal dari pendampingan LGSP di bidang keuangan dan penganggaran di Provinsi NAD.

## **DUKUNGAN BAGI PILKADA ACEH YANG BEBAS DAN ADIL**

Dalam waktu dekat, Aceh akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang pertama kalinya dalam sejarah provinsi tersebut. Dampak musibah tsunami menimbulkan problem tersendiri bagi berbagai kalangan yang terlibat dalam kegiatan Pilkada, terutama dalam hal teknis pelaksanaannya. DPRD Provinsi dan komisi pemilihan daerah harus merampingkan peraturan-peraturan tentang Pilkada yang mengatur administrasi pemilihan, pendaftaran ratusan ribu calon pemilih yang masih terdislokasi akibat tsunami, pelatihan para petugas pemungutan suara dan Panwas, serta mendidik masyarakat mengenai tata cara pemilihan.

USAID - LGSP mulai memberikan bantuan teknisnya pada tanggal 18 Juli 2005 lalu kepada KIP (Komite Independen Pemilihan) Aceh dalam lokakarya pertama KIP mengenai persiapan Pilkada yang akan datang. Konsultan LGSP untuk Pilkada menyampaikan beberapa masukan dan rekomendasi yang berguna kepada KIP dalam menyusun peraturan-peraturan mengenai Pilkada sesuai standar internasional, antara lain tentang pendaftaran calon pemilih, pemantauan dan evaluasi, pengajuan calon kepala daerah, dan penghitungan suara. Selain itu LGSP juga akan memberikan pendampingan berupa pelatihan mengenai pendaftaran calon pemilih, pelatihan mengenai prosedur dan pengelolaan pemilihan kepala daerah bagi anggota KIP dan para petugas pemungutan suara, prosedur dan pelatihan bagi Panwas tingkat Provinsi, memberikan pendidikan dan kode etik bagi para pemilih. Pendampingan LGSP untuk Pilkada ini diberikan atas kerjasama dengan International Republican Institute, JICA, IFES dan lembaga/donor lainnya.

## **PERLUASAN PROGRAM**

Pada tanggal 22 Juli 2005, LGSP meresmikan kemitraannya dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Acara peresmian kerjasama ini dihadiri oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD setempat; Mission Director USAID, William M. Frej; USAID Deputy Administration for Asia & Near East, Mark Ward; dan Direktur LGSP, Philip Schwehm. Total bantuan yang disediakan dalam kesepakatan kerja sama ini senilai US\$2,250,000, yang diberikan dalam bentuk pendampingan teknis bagi pemerintah daerah, DPRD, LSM, dan media massa di tiga daerah tersebut selama dua tahun. Dengan demikian, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya kini bergabung menjadi mitra LGSP-USAID, setelah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

Saat ini, bantuan LGSP diarahkan untuk mengembangkan keterampilan teknis para aparat pemerintah dan DPRD pemerintah daerah mitra dalam melaksanakan Rencana Tindak yang mereka susun serta memastikan keterlibatan penuh masyarakat dalam proses rekonstruksi. Direktur USAID, William M. Frej, menyatakan bahwa "Tugas utama saat ini adalah mengembalikan warga ke rumah mereka. Prioritas kami ialah meningkatkan kemampuan perencanaan rekonstruksi tata ruang dan pemukiman sesegera mungkin agar penduduk dapat mulai membangun kembali.

Program Dukungan Tata Kelola Pemerintahan (LGSP) merupakan prakarsa USAID dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk informasi dan kegiatan program lebih rinci, silakan hubungi: Local Governance Support Program (LGSP) Tel.: 62 21 515-1755 Fax.: 62 21 515-1752 email: [info@lgsp.or.id](mailto:info@lgsp.or.id) atau Local Governance Support Program (LGSP) di Aceh Tel.: +62 651 26609 email: [mnajib@lgsp.or.id](mailto:mnajib@lgsp.or.id) - [www.lgsp.or.id](http://www.lgsp.or.id)